

Izin Tukang Gigi Perseorangan - Perubahan

Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Scan Dokumen Pakta Integritas (Dengan Materai)	Wajib
2	Surat Rekomendasi dari Organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah	Wajib
3	Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktek	Wajib
4	Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm	Wajib
5	Izin Tukang Gigi yang lama	Wajib
6	Surat hasil kajian Teknis Visitasi dan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Pekerjaan Tukang Gigi dari Puskesmas di Wilayah Pekerjaan Tukang Gigi	Wajib
7	Surat Pernyataan Memiliki Pekerjaan Tukang Gigi dan Memenuhi Peraturan permenkes No. 39 Tahun 2014 (bermeterai)	Wajib
8	Biodata Tukang Gigi	Wajib
9	Scan Asli KTP Tukang Gigi	Wajib
10	Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi	Wajib
11	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem OSS	Wajib
12	Scan Izin Lokasi Yang Dikeluarkan Oleh OSS	Wajib

Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum
1	Undang - undang no.006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional
2	Undang - undang No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional
3	Undang - undang no. 5 Tahun 194 tentang Perindustrian
4	Undang - undang No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro,kecil dan menengah
5	Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1986 tentang kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri
6	Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
7	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
8	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
9	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
11	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
12	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
13	Undang - undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
14	Undang - undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
15	Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan

	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS. 373/HK/2020 Tentang Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya
1	7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.	Rp. 0,00